

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP  
PADA MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA MANADO**

**VINCE JULI RAHMAT TELAUMBANUA  
SALMIN DENGO  
NOVVA NOVITA PLANGITEN**

[vincetelaumbanua081@student.unsrat.ac.id](mailto:vincetelaumbanua081@student.unsrat.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of the Capture Fisheries Production Improvement Program for Fishermen's Communities in Manado City. This study used a qualitative method with the research location at the Department of Agriculture, Maritime Affairs and Fisheries of the City of Manado and the informants interviewed were 2 official employees and 4 fishing communities. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of the program to increase capture fisheries production in fishing communities in the city of Manado every year has been carried out properly in accordance with the applicable SOPs, although it is still not optimal and will experience development.*

*Keywords: Implementation, Program, Fishermen*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Pada Masyarakat Nelayan Di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian pada Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado dan informan yang di wawancarai ada 2 pegawai dinas dan 4 masyarakat nelayan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program peningkatan produksi peikanan tangkap pada masyarakat nelayan di kota manado setiap tahun telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku, walaupun masih belum maksimal dan akan mengalami perkembangan.

**Kata Kunci : Implementasi, Program, Nelayan**

## **PENDAHULUAN**

Nelayan memiliki tingkat kesejahteraan terendah yang ditandai dengan memiliki beberapa karakteristik yang dialami, keterbelakangan sosial dan budaya sumber daya manusia yang rendah (SDM) dan ketergantungan pada keahlian yang kurang. Adapun saat ini, pemerintah fokus untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya laut secara maksimal, pembangunan infrastruktur transportasi laut yang ada di setiap daerah dan pelabuhan disertai dengan pengembangan industri maritim yang kuat, terutama dengan meningkatkan kekuatan laut, ekonomi masyarakat untuk kemandirian maritim nantinya.

Adapun aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil menggambarkan peluang yang diberikan oleh pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu banyak masalah yang harus dihadapi, pemberdayaan masyarakat nelayan menjadi sebuah tantangan dan potensi sumber daya laut yang besar bagi perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi suatu wilayah atau desa. Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar sebagai sektor unggulan dan faktor kunci dalam membangun perekonomian kota Manado yang maju, mandiri dan sejahtera.

Sumber daya yang mereka garap, untuk mendapatkan tangkapan terbesar, para nelayan harus berpindah-pindah. Nelayan dari kawasan paling utara kota Manado, kemajuan ekonomi kota Manado tidak mempengaruhi nelayan, yang terlihat pada banyak masyarakat yang belum menekuni profesi lain, untuk terus memenuhi kebutuhan

keluarganya. Pemerintah terus berupaya memberikan perhatian kepada masyarakat nelayan, tetapi memang belum maksimal. Itu dilihat dari masalah yang sampai hari ini belum terselesaikan.

Kota Manado merupakan kota yang melaksanakan rehabilitasi pantai. Di Kota Manado yang berkembang menjadi kawasan industri berpola superblok, mengakibatkan terbentuknya pusat bisnis. Wajah kota mengarah ke kawasan pesisir yang menjadi masalah dan secara tidak langsung akan mempengaruhi lingkungan yang ada di Kota Manado.

Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Manado mengakui, pemerintah tidak memberikan perhatian maksimal kepada masyarakat nelayan karena keterbatasan anggaran sehingga banyak program bagi nelayan tidak terlaksana. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota Manado, dalam hal Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan kota Manado untuk meningkatkan taraf hidup dan membantu para nelayan tradisional di Manado, antara lain program peningkatan produksi perikanan tangkap dimana pelaksanaan program dilaksanakan dengan memberikan dukungan mengenai infrastruktur seperti mesin tempel, Katinting (perahu), mesin katinting (perahu), dan pendingin (coolbox) untuk nelayan program ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per.12/Men/2008 tentang Program Bantuan Langsung Masyarakat Kelautan dan Perikanan dan juga didukung dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No.1 tahun 2017 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara 2017-2037.

Bantuan atau program ini sebagai tanda perhatian pemerintah kota Manado kepada masyarakat nelayan kota Manado, sehingga

dengan adanya bantuan/program ini pendapatan para nelayan dalam kelompok nelayan produksi ikan dapat meningkat. Namun secara pelaksanaannya masih belum maksimal dan efektif dimana permasalahan program ini masih memiliki kendala dalam hal anggaran sehingga bantuan yang diberikan masih kurang merata kesetiap nelayan yang ada di kota Manado. Standar untuk program ini adalah supaya bisa di rasakan oleh semua kalangan nelayan yang ada di kota manado dan mengalami peningkatan produksi perikanan tangkapnya.

Berdasarkan observasi awal penulis, meskipun nelayan kecil mengetahui bahwa ada nelayan lain yang ditawarkan bantuan, namun tidak semua komunitas nelayan kecil pernah menerima bantuan karena distribusi nelayan kecil yang tidak merata. Masalah kesejahteraan nelayan masih belum terpecahkan mengingat bahwa ada masalah beban maksimum sumber daya laut sehingga strategi yang di terapkan oleh pemerintah kta Manado lebih lagi meningkatkan program yang telah dilaksanakan tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Christofel Rensi Wowor, Salmin Dengo, Very Londa (2019) dengan judul Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi sebelum dan sesudah intervensi kebijakan/program restorasi, keberhasilan dan kegagalan kebijakan restorasi pesisir, dan tujuan kebijakan restorasi pesisir. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian implementasi kebijakan

rehabilitasi pantai untuk boulevard di Kecamatan Sario Kota Manado, dapat disimpulkan bahwa program/kebijakan rehabilitasi pantai juga menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, yaitu:

Perubahan kondisi laut menyempit dan ekosistem laut rusak, perubahan kondisi ekonomi nelayan memburuk drastis, tindakan restorasi pantai juga berdampak meresahkan kondisi sosial.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Vena T.M Tambuwun, A.J. Rorong, Very Y. Londa dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal Studi di Desa Wawona Kecamatan Tatapaan. Penelitian ini menggunakan metode desain kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Implementasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa tertinggal yang dilakukan di Desa Wawona Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan telah dilakkan berdasarkan aspek Idealized policy/program kegiatan, memiliki target groups/kelompok sasaran dan implementing organisation/ organisaso pelaksana serta berkaitan dengan faktor lingkungan.
3. Penelitian yang di lakukan oleh Rifaldy Ilham Syah Sumah, Florence D.J. Lengkong, Novva N. Plangiten dengan judul Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. Untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data ang di perlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi dilakukan secara langsung melalui bentuk teguran lisan, sosialisasi, mediasi, dll.Sumber daya yang di gunakan dalam bentuk manusia (PNS dan THL). Disposisi para pelaksana masih kurang

humanis. Struktur organisasi telah sangat jelas tertata.

4. Penelitian yang di lakukan oleh Rycki Imanuel Yoseph Kansil, Joyce J. Rares, Rully Mambo dengan judul Implementasi Program Kelurahan Hebat Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diperoleh dari variabel Van Meter dan Van Horn.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Elvis Ruru, Florence D. J. Lengkong, Rully Mambo dengan judul Implementasi Program Digital Government Smart City Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

#### **Konsep Program**

Menurut Joan L. Herman yang di kutip di dalam Farida (2008:9) menyajikan pengertian program sebagai “Segala sesuatu yang di lakukan seseorang dengan harapan akan tercapainya hasil atau dampak”. Lebih lengkap, Hasibuan (2006:72) juga menunjukkan bahwa program merupakan rencana yang jelas dan konkrit, karena mengandung tujuan. Kebijakan, prosedur, anggaran dan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Selain itu, pengertian program juga tertuang dalam Undang-Undang RI No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan program adalah instrumen politik yang mencakup kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh satu atau lebih badan/instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan mendapat alokasi anggaran atau tindakan masyarakat yang dikoordinasikan oleh badan masyarakat.

Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho, 2009) kebijakan adalah program terencana dengan tujuan tertentu, nilai dan praktik tertentu (prediksi, tujuan, nilai, dan praktik

tertentu). Keban (2008) mengatakan bahwa bentuk-bentuk pengatur atau regulatif, bentuk redistributif dan distributif, dan bentuk konsitutif atau protektif. Masing-masing bentuk tersebut dapat di pahami dari tujuan dan sasaran sebuah program ke dalam bentuk konkrit atau penjabaran dari kebijakan.

#### **Konsep Implementasi**

Teori George C. Edwards III (2004) dalam pandangannya implementasi kebijakan di pengaruhi oleh empat variabel, yakni:

##### 1) Komunikasi

Dengan berhasil menerapkan kebijakan, penegak tahu apa yang harus dilakukan. Kelompok sasaran harus diinformasikan atau dikomunikasikan tentang tujuan dan maksud kebijakan untuk mengurangi bias implementasi.

##### 2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, implemenasinya tidak akan berjalan efektif jika pelaksana tidak memiliki sarana untuk melaksanakannya. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu: pengetahuan dan sumber keuangan. Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan tetap di atas kertas dan menjadi dokumen.

##### 3) Disposisi

Disposisi adalah sifat dan ciri-ciri pelaksana. Jika pelaksana memiliki sikap yang baik, maka mereka akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pengambil keputusan.

##### 4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari suatu organisasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana

di perusahaan. Struktur organisasi yang terlalu lama melemahkan kontrol dan mengarah pada birokrasi, sehingga prosedur birokrasi yang kompleks dan rumit, yang pada gilirannya membuat fungsi organisasi menjadi tidak fleksibel.

Model pendekatan implementasi kebijakan/implementasi program yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn disebut Model Implementasi Kebijakan (1975). Proses implementasi ini merupakan abstraksi dari pemahaman politik, pada hakekatnya dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi implementasi kebijakan yang tinggi yang terjadi dalam kaitannya dengan berbagai variabel. Model ini mengasumsikan bahwa implementasi politik berlangsung secara linier dari keputusan kebijakan dan efektivitas politik dipengaruhi oleh beberapa variabel tersebut, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Dikemukakan dalam Charles O. Jones, (1984:166), memaparkan tiga prinsip yang, sebagai berikut:

1. Dimensi organisasi implementasi kebijakan adalah redistribusi sumber daya, unit dan metode yang mempengaruhi program.
2. Dimensi interpretasi berupaya menginterpretasikan sedemikian rupa sehingga program menjadi rencana yang dapat diarahkan, disetujui, dan diterapkan dengan benar.
3. Dimensi penerapan/pengaplikasian yakni merupakan Aturan rutin berdasarkan layanan, pembayaran,

atau tujuan atau perangkat program lainnya.

### **Konsep Nelayan**

Menurut KBBI, nelayan adalah orang yang pekerjaan utamanya menangkap ikan (di laut). Nelayan adalah tipikal masyarakat yang tumbuh dan berkembang di pesisir pantai, yang mata pencahariannya bergantung langsung pada hasil laut dan merupakan mata pencaharian utama mereka (Imron, 2003). Seperti yang kita ketahui, nelayan terdiri dari tiga karakteristik yaitu nelayan pekerja, nelayan juragan dan nelayan solo.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian penulis adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Laut Kota Manado. Fokus kajian ini adalah pada refleksi teori Van Meter dan Van Horn yang disebut "Model Implementasi Kebijakan" (1975). Menggunakan teknik pengumpulan data yang mendalam meliputi: observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. (Sugiyono, 2012: 401).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa informan di lapangan yaitu : 1 orang kepala bidang kelautan dan perikanan, 1 orang koodinator penyuluh perikanan, dan 4 orang masyarakat nelayan.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya sebagai berikut:

Program peningkatan Produksi Perikanan merupakan program yang dilakukan oleh DPKP kota Manado yang terus berjalan dalam setiap tahun. Program ini sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana pada dasarnya program ini diperuntukan kepada seluruh msyarakat nelayan di kota manado tapi karena anggaran masih kurang maka pemberian bantuan kepada nelayan dalam sistem bertahap dan sesuai dengan sop yang berlaku. Program ini



juga bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha yang dimiliki nelayan dan membantu para nelayan dalam berbagai fasilitas untuk melaut, sehingga dapat meningkatkan hasil tangkap pada masyarakat nelayan. Untuk tahun 2022, program ini sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu di bulan oktober dan desember. Adapun bantuan yang sudah pernah diberikan melalui program ini seperti katinting (kapal 15 GT) dalam/mesin katinting, mesin tempel, dan coolbox. Harapan pemerintah dengan adanya bantuan ini bisa membuat nelayan lebih bersemangat dan menaikkan pendapatan para nelayan untuk ketercapaian sasaran program kedepannya.

Untuk sumber daya dalam hal SDM yang ada yang bertanggung jawab dalam program ini masih mengalami masalah dalam jumlah SDM nya sehingga pegawai akan lebih bekerja keras demi tercapainya program yang dilaksanakan itu di karenakan bahwa bidang yang bertanggung jawab dalam program ini yaitu Bidang kelautan dan perikanan yang dulunya adalah sebuah dinas namun pada tahun 2017 di pindahkan oleh pemkot menjadi sebuah bidang di Dinas PKP kota manado. Bukan hanya SDM nya yang kurang tetapi fasilitas yang digunakan masih belum maksimal mulai dari kantor dan peralatan kantor yang seadanya.

Masyarakat nelayan sebagai target program juga merasa terbantu dengan adanya program ini dalam aspek sosial, ekonomi dan politik mengalami perubahan yang menambah kepercayaan kepada pemerintah yang ada. Namun dibalik program yang sudah dilaksanakan dan pelayanan yang baik masih ada keluhan-keluhan masyarakat yang harus di perhatikan oleh para pelaksana program. Masyarakat berharap untuk tahun kedepan pemerintah lebih memaksimalkan lagi program tersebut sehingga terjadi pemerataan bantuan bagi seluruh kalangan nelayan yang ada di kota manado.

## 1. Standar dan sasaran Program

Hasil dari adanya kebijakan pelaksanaan program tersebut membuahkan hasil yang positif bagi masyarakat nelayan yang menerima bantuan tersebut, mereka mendapatkan peningkatan produksi tangkap yang mereka hitung setiap bulan yang di arahkan oleh ketua kelompok nelayan tersebut. Walaupun tidak sepenuhnya program tersebut maksimal di karenakan masih banyak yang belum merasakan bantuan program tersebut. Tapi ini merupakan awal yang baik dalam hal meningkatkan dan melanjutkan rencana program kedepan di tahun 2023 nantinya.

## 2. Sumber Daya

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber, terdapat kesan bahwa sumber daya manusia masih kurang, terutama dalam hal kecukupan kualitas strategi/implementasi program. memenuhi syarat untuk memahami aturan yang terkait dengan program peningkatan produksi perikanan. Menurut penulis, SDM Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan kurang tanggap terhadap tugas pokok dan tugas unit tersebut, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program pengembangan perikanan tangkap. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya untuk mendukung di lapangan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat nelayan yang akan diberi izin. Akibatnya, ini mempengaruhi kegiatan pengawasan. Fasilitas yang digunakan oleh pelaksana sangat kurang sehingga itu merupakan sebuah hambatan bagi mereka untuk mengawasi perkembangan program yang ada di lapangan sehingga membuat mereka terhambat dan kurang maksimal.

## 3. Karakteristik Badan Pelaksana

Struktur birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan cukup baik, pembagian kerja antar cabang. Namun, karena pengaruh administrasi, kesulitan koordinasi muncul.

Sistem koordinasi dan dukungan otoritas lain masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, misalnya dengan meningkatkan intensitas pertemuan koordinasi lintas sektor dengan masyarakat penerima manfaat, sehingga dapat dimulai sasaran dan tujuan program peningkatan produksi perikanan tangkap.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara dengan informan pihak dinas sudah melakukan program dengan baik berdasarkan fungsi dan sop yang berlaku. walaupun sasaran kebijakan ini masih kurang dimana hanya di rasakan oleh kelompok nelayan saja dan tidak dirasakan oleh perorang dalam hal ini nelayan tradisional.

#### **4. Sikap Para Pelaksana**

Sikap para pelaksana di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan melaksanakan dengan respon positif, mereka memberikan informasi sesuai dengan kebijakan atau aturan yang telah di sampaikan atasan atau pemimpin organisasi.

#### **5. Komunikasi**

Dari hasil wawancara peneliti diketahui bahwa komunikasi hanya terjadi antara pemerintah dengan penerima manfaat dalam hubungan dengan penerimaan bantuan yang sepenuhnya kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam kelompok nelayan. Memang nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan merasakan kehadiran pemerintah dalam hal membantu peningkatan produksi perikanan mereka tetapi mereka juga merasa kasihan terhadap nelayan yang belum tergabung karena mereka juga sama sama nelayan yang membutuhkan perhatian dari pemerintah namun pemerintah telah menyampaikan informasi jauh-jauh hari tentang syarat-syarat penerimaan bantuan program ini baik lewat sosialisasi yang dilakukan terhadap nelayan dan setiap pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan.

Hal ini sangat memprihatinkan karena masih kurangnya pemerataan informasi yang membuat para masyarakat beranggapan negatif atau buruk kepada pemerintah yang seakan tidak memperhatikan keadaan nelayan tradisional yang hanya mengandalkan modal sendiri untuk melaut. Di lain sisi kbid kelautan dan perikanan menjelaskan pelaksana program juga telah berupaya untuk mencari solusi dengan menyampaikan masalah ini kepada pemerintah daerah tetapi masih dalam proses mengingat dana dari pemda masih kurang untuk pemerataan bantuan tersebut. Fenomena tersebut terus berlangsung selama bantuan tersedia, yang peneliti katakan karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

#### **6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik**

Dalam hal ini Peneliti berpatokan berdasarkan teori menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005:99) menyatakan bahwa kondisi sosial, politik, dan ekonomi adalah dampak indikator lingkungan terhadap implementasi program/kebijakan, termasuk sumber keuangan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana, seperti sifat opini publik, dukungan elit, peran dan pemangku kepentingan, dan sektor swasta. dukungan program yang sukses. Keberhasilan kebijakan didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mendukung kebijakan dan secara aktif membentuknya. peneliti menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang kurang kondusif di lingkungan masyarakat menjadi salah satu stimulan lemahnya dukungan dari penerima kebijakan ini.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Standar dan sasaran Kebijakan**

Sasaran kebijakan atau pemerintah dalam hal ini program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian

Kelautan dan Perikanan sudah cukup efektif dilaksanakan dengan baik sesuai dengan praktik yang berlaku.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang ada di dinas pertanian kelautan dan perikanan masih terdapat kekurangan baik dari fasilitas maupun tenaga kerja yang belum cukup.

3. Karakteristik Pelaksana

Pengawasan dan Pengendalian yang merupakan sebagai Karakteristik badan pelaksana masih belum konkret di rasakan oleh para masyarakat nelayan.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap para pelaksana di Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan melaksanakan dengan respon positif, mereka memberikan informasi sesuai dengan kebijakan atau aturan yang telah di sampaikan atasan atau pemimpin organisasi. Namun ada juga yang kurang memperhatikan sikap para pekerja terutama dalam kaitannya dengan pemberian bantuan sesuai tujuan.

5. Komunikasi

Dari Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan penerima manfaat hanya terjadi terkait dengan penerimaan bantuan atau program yang sepenuhnya kepada masyarakat yang sudah terdaftar dalam kelompok nelayan..

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Persepsi nelayan terhadap Program peningkatan produksi perikanan tangkap ada yang positif dan ada yang negatif. Kondisi ekonomi yang kurang kondusif di lingkungan masyarakat menjadi salah satu

stimulan lemahnya dukungan dari penerima kebijakan ini.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran diantaranya:

1. Sasaran kebijakan/ program peningkatan produksi perikanan tangkap ini harus di evaluasi kembali mengingat masih terdapat salah salah sasaran dalam pelaksanaanya.
2. Peningkatan sumber daya harus di rencanakan oleh pemerintah kota manado karna kurang efesiensi dalam melakukan program ketika sumber daya masih belum terselesaikan dengan baik.
3. Pengawasan dan pengendalian oleh pihak pelaksana harus lebih konkret lagi di lapangan sehingga tau apa sebenarnya terjadi dan yang dirasakan oleh masyarakat nelayan.
4. Pemerintah lebih meningkatkan keperhatinan kepada masyarakat nelayan dengan memberikan mengambil sikap peduli baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan di lapangan.
5. lebih meningkatkan komunikasi bukan hanya ada pada saat pemberian bantuan/program namun sampai mendapatkan hasil yang efektif.
6. Setiap keluhan masyarakat terhadap program pemerintah lebih memperhatikan keluhan tersebut dan di sampaikan di pemerintah daerah apabila tidak bisa di selesaikan di dalam pemerintahan kota.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Blalock, H. M. 1987. *Pengantar Penelitian Sosial*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Horn, C.V. Meter, D.V. *Model model dalam kebijakan implementasi*. Yogyakarta



- Wowor, C. R. Dengo, S. Londa, V.Y. 2019. Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*. <http://ejournal.unsrat.ac.id>.
- David, F.R. 2009. *Manajemen Strategis Konsep, Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat
- Henry, N. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah Masalah Kenepegaraan*. Jakarta:CV Rajawali.
- Herman, J.L. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Imron. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta:Media Pressindo.
- Jones, C.O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta:PT RajaGrafindoPersada.
- Kansil, R.I.Y. Rares, J.J. Mambo, R. 2022. Implementasi Program Kelurahan Hebat Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung. *Jurnal Administrasi Publik*.<http://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan Dalam Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.
- Miles, H. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. United States Of America: Sage Publication.
- Nawawi, I. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Jakarta: PT. Fajar Iterpratama Mandiri.
- Ruru, E. Lengkong, F. D. J. Mambo, R. 2020. Implementasi Program Digital Government Smart City Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*. <http://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Siagian, S.P. 2003. *Teori & praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sobandi, B. 2004. *Etika Kebijakan Publik Moralitas-profesi dan Profesionalisme Kinerja Birokrasi*. Bandung:Humaniora Utama Press (HUP).
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik:Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Sumah, R.I.S. Lengkong, F.D.J. Plangiten, N.N. 2020. Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*. <http://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Supriharyono. 2000. *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tambuwun, V.T.M. Rorong, A.J. Londa, V.Y. 2022. Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal Studi Di Desa Wawona Kecamatan Tatapaan. *Jurnal Administrasi Publik*. <http://ejournal.unsrat.ac.id>.

#### **Sumber Lain**

- Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per. 12/Men/2008 Tentang Program Bantuan Langsung Masyarakat Kelautan dan Perikanan
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2017 Tentang Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-  
Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).